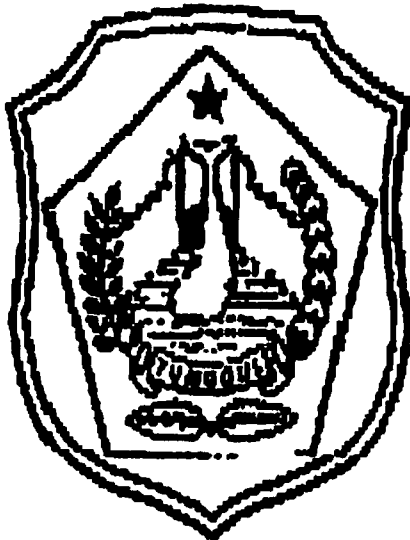
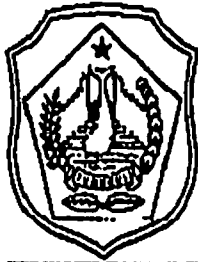


**PERATURAN DESA TUNGGUL
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN 2013**



**DESA TUNGGUL KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
DESA TUNGGUL**

Alamat : Jl. Raya Tunggul No.141 Paciran Lamongan 62264 Telp. (0322) 666250 Jawa Timur

**PERATURAN DESA TUNGGUL
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNGGUL
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. Peraturan Desa Tunggul Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa ;

Memperhatikan :

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tunggul Nomor 02 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGUL

Dan

KEPALA DESA TUNGGUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DESA TUNGGUL NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNGGUL TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggul Tahun 2013 sejumlah Rp 752.120.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|----------------|
| a. Pendapatan | Rp 752.120.000 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp.261.867.000 |
| 2) Tidak Langsung | Rp.490.353.000 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp 0 |
| 2) Pengeluaran | Rp 0 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Tunggul
Pada Tanggal : 22 Maret 2013

KEPALA DESA TUNGGUL



Lampiran 1 : Peraturan Desa Tunggul
 Nomor : 2 Tahun 2013
 Tanggal : 22 Maret 2013
 Perihal : ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA TUNGGUL

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNGGUL
 KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN**

TH 2013

A. PENDAPATAN DESA

1.1. Pendapatan Asli Desa	Rp 203.250.000
1.2. Bagi Hasil Pajak	Rp 6.200.000
1.3. Bagi hasil Retribusi	Rp -
1.4. Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah	Rp 52.500.000
1.5. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kabupaten /Kota dan desa Lainnya	Rp 92.450.000
1.6. Hibah	Rp 395.000.000
1.7. Sumbangan Dari pihak ketiga	Rp 2.720.000

JUMLAH Rp 752.120.000

B. BELANJA

2.1. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai /HR	Rp 19.070.000
2. Belanja ATK/ Jasa	Rp 160.797.000
3. Belanja Bahan Material	Rp 147.797.000
4. Belanja Modal	Rp 95.000.000

JUMLAH Rp 261.867.000

2.2. Belanja Tidak langsung

1. Belanja Pegawai /Penghasilan tetap	Rp 119.500.000
2. Belanja Hibah	Rp 327.900.000
3. Belanja Bantuan Sosial	Rp 10.200.000
4. Bantuan Operasional	Rp 16.700.000
5. Belanja Tak Terduga	Rp 16.853.000

JUMLAH Rp490.253.000

C. PEMBIAYAAN

A. Pengeluaran pembiayaan

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SLPA) Tahun Sebelumnya	Rp.
2. Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan	Rp. _____

B. Pengeluaran Pembiayaan :

1. Pembentukan Dana cadangan	Rp.
2. Penyertaan Modal Desa	Rp.
3. Pembayaran hutang	Rp.
JUMLAH	Rp 752.120.000



Tunggul, 22 Maret 2013
 Kepala Desa Tunggul

M. YASIN

Lampiran I : Peraturan Desa Tunggul
 Nomor : 2 Tahun 2013
 Tanggal : 22 Maret 2013
 Perihal : Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Desa (APBDes)
 Tahun 2013

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNGGUL
 KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2013**

Kode Rekening	Uraian	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Ket
1	2	3	4	
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	157,924,000	203,250,000	
1.1.1	Hasi Usaha Desa	26,000,000	27,600,000	
1.1.1.1	Hasil Pasar Desa	21,400,000	22,000,000	
1.1.1.2	SHU Koperasi LEEP M3	3,600,000	3,600,000	
1.1.1.3	SHU Lumbung Pangan	1,000,000	2,000,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	13,550,000	8,000,000	
1.1.2.1	Hasil Tanah Kas Desa	6,000,000	6,000,000	
1.1.2.2	Hasil Sewa tanah Keramat Genting			
1.1.2.3	Hasil Sewa tanah Keramat Tunggul	6,050,000		
1.1.2.4	Hasil Penjualan Buah Jambu	500,000	1,000,000	
1.1.2.5	Hasil Penjualan Bunga Kamboja Kuburan	1,000,000	1,000,000	
1.1.3	Pos Hasil Swadaya dan Partisipasi	49,000,000	87,500,000	
1.1.3.1	Sumbangan Masyarakat untuk Pembangunan Jalan	27,000,000	27,000,000	
1.1.3.2	Hasil Usaha Air Bersih Desa	14,000,000	18,000,000	
1.1.3.3	Iuran Natura Swadaya (Kaleng Sholat Id)	8,000,000	8,000,000	
1.1.3.4	Iuran Peringatan HUT 17 Agustus		6,000,000	
1.1.3.5	Partisipasi PILKADES		28,500,000	
1.1.4	Pos Hasil Gotong Royong	39,150,000	39,150,000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong Royong	39,150,000	39,150,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	30,224,000	41,000,000	
1.1.5.1	Hasil Leges Surat – Surat	7,000,000	7,000,000	
1.1.5.2	Jual Beli Tanah	20,000,000	30,000,000	
1.1.5.3	Sumber lain yang sah	3,224,000	4,000,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak	5,800,000	6,200,000	
1.2.1	Hasil Pajak Kabupaten Kota			
1.2.2	Bagian Penerimaan PBB	5,800,000	6,200,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	52,500,000	52,500,000	
1.4.1	Dana Alokasi Pembangunan Desa (ADD)	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	Bantuan Pembangunan Dusun Tunggul (Bansun)	11,000,000	5,500,000	
1.4.3	Bantuan Pembangunan Dusun Genting (Bansun)		5,500,000	
1.5	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI ,KABUPATEN /KOTA DAN DESA LAINNYA	67,800,000	92,450,000	

2.2.1.1.4	Jual Beli Tanah	1,000,000	1.500.000	
2.2.1.3.3	Hasil Tanah Bengkok	500,000	500.000	
2.2.1.3.4	Vakasi (UP PBB)	100,000	100.000	
2.2.1.4.	Penghasilan Kaur Umum	<u>10,000,000</u>	<u>11,100,000</u>	
2.2.1.4.1	Gaji (Rp 100.000,-) per bulan	1,200,000	1,200,000	
2.2.1.4.2	Tunjangan Kesejahteraan (TPAPD)	6,800,000	7,200,000	
2.2.1.4.3	Jual Beli Tanah	1,000,000	1.500,000	
2.2.1.4.4	Hasil Tanah Bengkok	500,000	500,000	
2.2.1.4.5	Vakasi (UP PBB)	100,000	100,000	
2.2.1. 5	Penghasilan Kasi Pemerintahan	<u>10,000,000</u>	<u>11,100,000</u>	
2.2.1.5.1	Gaji (Rp 100.000,-) per bulan	1,200,000	1,200,000	
2.2.1.5.2	Tunjangan Kesejahteraan (TPAPD)	6,600,000	7,200,000	
2.2.1.5.3	Jual Beli Tanah	1,000,000	1.500,000	
2.2.1.5.4	Hasil Tanah Bengkok	500,000	500,000	
2.2.1.5.5	Vakasi (UP PBB)	100,000	100,000	
2.2.1. 6.	Penghasilan Kasi Ekbang	<u>10,000,000</u>	<u>11,100,000</u>	
2.2..1.6.1	Gaji (Rp 100.000,-) per bulan	1,200,000	1,200,000	
2.2..1.6.2	Tunjangan Kesejahteraan (TPAPD)	6,600,000	7,200,000	
2.2..1.6.3	Jual Beli Tanah	1,000,000	1.500,000	
2.2..1.6.4	Hasil Tanah Bengkok	500,000	500,000	
2.2..1.6.5	Vakasi (UP PBB)	100,000	100,000	
2.2.1. 7	Penghasilan Kasi Trantib	<u>10,000,000</u>	<u>11,100,000</u>	
2.2..1.7.1	Gaji (Rp 100.000,-) per bulan	1,200,000	1,200,000	
2.2..1.7.2	Tunjangan Kesejahteraan (TPAPD)	6,600,000	7,200,000	
2.2..1.7.3	Jual Beli Tanah	1,000,000	1.500,000	
2.2..1.7.4	Hasil Tanah Bengkok	500,000	500,000	
2.2..1.7.5	Vakasi (UP PBB)	100,000	100,000	
2.2.1. 8.	Penghasilan Kasi Kesos(Kesra)	<u>10,000,000</u>	<u>11,100,000</u>	
2.2..1.8.1	Gaji (Rp 100.000,-) per bulan	1,200,000	1,200,000	
2.2..1.8.2	Tunjangan Kesejahteraan (TPAPD)	6,600,000	7,200,000	
2.2..1.8.3	Jual Beli Tanah	1,000,000	1.500,000	
2.2..1.8.4	Hasil Tanah Bengkok	500,000	500,000	
2.2..1.8.5	Vakasi (UP PBB)	100,000	100,000	
2.2.1.9.	Penghasilan Kasun Tunggul	<u>10,000,000</u>	<u>11,100,000</u>	
2.2.1.9.1	Gaji (Rp 100.000,-) per bulan	1,200,000	1,200,000	
2.2.1.9.2	Tunjangan Kesejahteraan (TPAPD)	6,600,000	7,200,000	
2.2.1.9.3	Jual Beli Tanah	1,000,000	1.500,000	
2.2.1.9.4	Hasil Tanah Bengkok	500,000	500,000	
2.2.1.9.5	Vakasi (UP PBB)	100,000	100,000	
2.2.1. 10.	Penghasilan Kasun Genting	<u>10,000,000</u>	<u>11,100,000</u>	
2.2.1.10.1	Gaji (Rp 100.000,-) per bulan	1,200,000	1,200,000	
2.2.1.10.2	Tunjangan Kesejahteraan (TPAPD)	6,600,000	7,200,000	
2.2.1.10.3	Hasil Tanah Bengkok	1,000,000	1.500,000	
2.2.1.10.4	Jual Beli Tanah	500,000	500,000	
2.2.1.10.5	Vakasi (UP PBB)	100,000	100,000	
2.2.2	Belanja HIBAH	<u>188,900,000</u>	<u>238,900,000</u>	
2.2.2.1	Pembangunan Jalan Poros Desa (Dusun Genting)	40,000,000	40,000,000	
2.2.2.2	Pembangunan Jalan Desa (Jamas)	100,000,000	100,000,000	
2.2.2.3	Pemasangan Pipa Air Bersih	26,000,000	26,000,000	
2.2.2.4	Pengeboran Air Bersih Di Tawing (Cadangan)	5,400,000	5,400,000	

1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat			
1.5.1.1	Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah			
1.5.2	Bantuan Pemerintah Provinsi		0	
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa (BKD)			
1.5.3	Bantuan Pemerintah Kabupaten/ Kota	<u>67,800,000</u>	<u>92,450,000</u>	
1.5.2.1	Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa	62,400,000	67,800,000	
1.5.2.2	Tunjangan Pehasilan BPD	4,400,000	6,650,000	
1.5.2.3	Tunjangan Purna Bakti Kepala Desa		5,000,000	
	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.2.4	Tunjangan Purna Bakti BPD		5,500,000	
1.5.2.5	Tunjangan Purna Bakti Perangkat			
1.5.2.6	Biaya PILKADES		6,500,000	
1.6	Hibah	<u>350,500,000</u>	<u>395,000,000</u>	
1.6.1	Hibah Dari Pemerintah Pusat	<u>5,500,000</u>	<u>75,000,000</u>	
1.6.1.1	Bantuan PNPM Mandiri		75,000,000	
1.6.1.2	Hadiah PNPM Mandiri			
1.6.1.3	Pembangunan Plengsengan Penahan Abrasi di belakang SDN 1 Tunggul	5,500,000		
1.6.2	Hibah Dari Pemerintah Propinsi	<u>275,000,000</u>	<u>275,000,000</u>	
1.6.2.1	Pembangunan Pasar Desa	200,000,000	100,000,000	
1.6.2.2	Pembangun Jalan Desa (JAMAS) Propinsi	75,000,000	75,000,000	
1.6.2.3	Rehap Balai Desa		100,000,000	
1.6.3	Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Kota	<u>70,000,000</u>	<u>70,000,000</u>	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros Desa (Dusun Tunggul)	40,000,000	40,000,000	
1.6.3.3	Pengerukan Sungai Desa Tunggul	30,000,000	30,000,000	
1.7	Sumbangan dari pihak ke tiga	<u>12,720,000</u>	<u>2,720,000</u>	
1.7.1	Sumbangan Kayu dari ASDP 2 truk	10,000,000		
1.7.2	Dari dana Sosial UPK Kecamatan	2,300,000	2,300,000	
	JUMLAH PENDAPATAN	<u>647,244,000</u>	<u>752,120,000</u>	
2.1	Belanja Langsung	<u>292,617,000</u>	<u>261,867,000</u>	
2.1.1	Belanja Pegawai /Honorarium	<u>16,820,000</u>	<u>19,070,000</u>	
2.1.1.1	Honor BPD	4,020,000	4,020,000	
2.1.1.2	Honor Sekretaris BPD			
2.1.1.3	Tunjangan Penghasilan BPD	4,400,000	6,650,000	
2.1.1.4	Tunjangan Hari raya	1,200,000	1,200,000	
2.1.1.5	Petugas Kebersihan	1,800,000	1,800,000	
2.1.1.6	Petugas Retrebusi pasar	3,600,000	3,600,000	
2.1.1.7	Petugas Kebersihan Kantor	1,800,000	1,800,000	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa :	<u>125,297,000</u>	<u>160,797,000</u>	
2.1.2.1	Belanja ATK/ Jasa	<u>9,500,000</u>	<u>13,000,000</u>	
2.1.2.1.1	Pengadaan ATK/ Foto Copy	3,000,000	3,000,000	
2.1.2.1.2	Pembelian Inventaris Kantor	1,500,000	3,500,000	
2.1.2.1.3	Pembelian Komputer			
2.1.2.1.4	Pembelian Printer Canon	1,000,000	1,000,000	

2.1.2.1.5	Pengadaan Papan data		1,000,000	
2.1.2.1.6	Pembelian Almari Data	3,500,000	3,500,000	
2.1.2.1.7	Biaya Pengisian Data Statistik dan Profil	500,000	1,000,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	115,797,000	147,797,000	
2.1.2.2.1	Seragam RT/RW 26 Potong	3,500,000	3,500,000	
2.1.2.2.2	Pembelian Seragam Linmas 6 stel	3,500,000	3,500,000	
2.1.2.2.3	Biaya Pemeliharaan Kantor	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.4	Biaya pemeliharaan Inventaris Kantor	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.5	Biaya Pemeliharaan Pasar Desa	13,500,000	13,500,000	
2.1.2.2.6	Biaya Pemeliharaan Kebersihan Kuburan	1,500,000	1,500,000	
2.1.2.2.7	Biaya Pemeliharaan Jalan Desa	5,000,000	5,000,000	
2.1.2.2.8	Biaya Perjalanan Dinas (Kades , Sekdes Kaur dan Kasi)	3,000,000	3,000,000	
2.1.2.2.9	Biaya Pilihan Kepala Desa		35,000,000	
2.1.2.2.10	Biaya Pilihan Perangkat	1,000,000		
2.1.2.2.11	Biaya Pemilihan RT/RW		2,000,000	
2.1.2.2.12	Biaya Pajak Kendaraan Dinas	250,000	250,000	
2.1.2.2.13	Biaya Konsumsi Pemilihan Umum	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.14	Biaya Konsumsi harian Di Kantor dan tamu insident	4,000,000	4,000,000	
2.1.2.2.15	Biaya Peringatan PHBN	7,000,000	10,000,000	
2.1.2.2.16	Biaya Pengadaan Bendera merah putih / Umbul-umbul.	497,000	497,000	
2.1.2.2.17	Biaya Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	6,000,000	6,000,000	
2.1.2.2.18	Biaya Bak Sampah	10,000,000	3,000,000	
2.1.2.2.19	Pengurukan dan Pemerataan Lapangan	8,000,000	8,000,000	
2.1.2.2.20	Belanja Pembangunan Desa (Bandes)	29,050,000	29,050,000	
2.1.2.2.21	Belanja pembangunan Bansun Tunggul (Bansun)	5,500,000	5,500,000	
2.1.2.2.22	Belanja Pembangunan Dusun Genting (Bansun)	5,500,000	5,500,000	
2.1.2.2.23	Rehab Kamar MANDI Balai Desa	5,000,000	5,000,000	
2.1.3	Belanja Modal	160,000,000	95,000,000	
2.1.3.1	Belanja Modal Jaringan Air Bersih ke ASDP	160,000,000	95,000,000	
2.2	Belanja Tidak Langsung :	345,127,000	402,263,000	
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan tetap	105,100,000	119,500,000	
2.2.1.1	Penghasilan Kepala Desa	20,600,000	24,200,000	
2.2.1.1.1	Gaji (Rp 200.000,-) per bulan	2,400,000	2,400,000	
2.2.1.1.2	Tunjangan Kesejahteraan (TPAPD)	9,600,000	10,200,000	
2.2.1.1.3	Vakasi (UP PBB)	600,000	600,000	
2.2.1.1.4	Hasil Tanah Bengkok	2,000,000	2,000,000	
2.2.1.1.5	Jual Beli Tanah	6,000,000	9,000,000	
2.2.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa	4,500,000	6,500,000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kesejahteraan (TPAPD)			
2.2.1.2.2	Vakasi (UP PBB)	500,000	500,000	
2.2.1.2.3	Jual Beli Tanah	4,000,000	6,000,000	
2.2.1.3.	Penghasilan Kaur Keuangan	10,000,000	11,100,000	
2.2.1.3.1	Gaji (Rp 100.000,-) per bulan	1,800,000	1,800,000	
2.2.1.3.2	Tunjangan Kesejahteraan (TPAPD)	6,600,000	7,200,000	

2.2.2.5	Pembelian Marsibel	12,000,000	12,000,000	
2.2.2.6	PMPM (Paving Jalan Sekrikil)		50,000,000	
2.2.2.10	Pembangunan Tutup Got Ngebrak	5,500,000	5,500,000	
2.2.2.11	Pembangunan Pasar Desa	20.000	75,000,000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	15,600,000	10,300,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBI /Keagamaan	1,600,000	1,600,000	
2.2.3.2	Kegiatan PHBN	7,600,000	7.600.000	
2.2.3.3	Setoran Baz ke Kecamatan	1,200,000	1,200,000	
2.2.3.4	Perbaikan Rumah Warga	2,900,000	2,900,000	
2.2.3.5	Bantuan UPK Kecamatan 46 Warga @ RP. 50.000	2,300,000	2,300,000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan/Operasional	16,700,000	16,700,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	3,450,000	3,450,000	
2.2.4.2	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.3	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.4	Operasional RT / RW	2,550,000	2,550,000	
2.2.4.5	Operasional Linmas	1,200,000	1,200,000	
2.2.4.6	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.7	Operasional Trantip	500,000	500,000	
2.2.4.8	Oprasional Karangtaruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.9	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.5	Belanja tak Terduga	18,827,000	16,853,000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	3,527,000	3,527,000	
2.2.5.2	Sumbangan Dana Sosial UPK 46 warga	2,300,000	2,300,000	
2.2.5.3	Sumbangan Bencana Alam	3,000,000		
2.2.5.4	Konsumsi Rapat	4,000,000	4,000,000	
2.2.5.5	Pengeluaran tak terduga	6,000,000	7,026,000	
	PEMBIAYAAN	0	0	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SLPA) Tahun Lalu	-	-	
	JUMLAH BELANJA	647,244,000	752,120,000	



Tunggul, 22 Maret 2013
Kepala Desa Tunggul

M. YASIN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TUNGGUL KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN
Alamat : Jalan Raya Tunggul No 141 Telp (0322) 666250**

**PERSETUJUAN PERATURAN DESA TUNGGUL
NOMOR: 02 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNGGUL
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGUL

Menimbang: : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggul Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. Peraturan Desa Tunggul Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa ;

Memperhatikan :

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tunggul Nomor 02 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUNGGUL

Dan

KEPALA DESA TUNGGUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TUNGGUL NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNGGUL TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggul Tahun 2013 sejumlah Rp 752.120.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|----------------|
| d. Pendapatan | Rp 752.120.000 |
| e. Belanja | |
| 3) Langsung | Rp.261.867.000 |
| 4) Tidak Langsung | Rp.402.253.000 |
| f. Pembiayaan | |
| 3) Penerimaan | Rp 0 |
| 4) Pengeluaran | Rp 0 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Tunggul

Pada Tanggal : 22 Maret 2013

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,



Drs. GHUFRON, M.Pd

Keputusan ini disampaikan kepada ;

- Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan
 2. Sdr. Camat Paciran
 3. Sdr. Kepala Desa Tunggul Kecamatan Paciran

**BERITA ACARA MUSYAWARAH
PERSETUJUAN PERATURAN DESA TUNGGUL
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUNGGUL
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

Tunggul pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua puluh dua** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Tigabelas** , bertempat di Balai Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, telah dilaksanakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Tunggul sebagaimana daftar hadir terlampir, yang di pimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, guna membahas Persetujuan Peraturan Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013. Berdasarkan hasil Musyawarah dari seluruh anggota peserta Musyawarah setuju dan sepakat ditetapkannya Peraturan Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TUNGGUL**

- | | | |
|----------------|---|------------------------|
| 1. Ketua | : | Drs. GHUFRON, M.Pd |
| 2. wakil Ketua | : | MUDZAKIR IKROM S.Ag |
| 3. Sekretaris | : | Drs .H BUDI SANTOSO |
| 4. Anggota | : | ZAINURRI, S.Pd |
| 5. Anggota | : | DWI UTAMI MINARNI M.Pd |
| 6. Anggota | : | H. SUPRAPTO |
| 7. Anggota | : | KASTAKIM |
| 8. Anggota | : | MUSRAN |
| 9. Anggota | : | LUKMAN HAKIM |
| 10. Anggota | : | M. YASIN, S.Pd.I |
| 11. Anggota | : | SRI WILUJENG |



1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
